

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Studi Analisis Perilaku Pemilih dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Kemiri Kabupaten Karanganyar

Rina Wahyuningtyas
Universitas Sebelas Maret
rinawahyu@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku memilih desa pawisman gedangan dengan adanya pelaksanaan pilkades di desa kemiri. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka penelitian sebelumnya yang relevan. Penulis mencoba untuk menggambarkan karakteristik pemilih, mengidentifikasi perilaku memilih masyarakat gedangan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan memilih berdasarkan pertimbangan sosiologis dan rasionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga desa kemiri menggunakan pendekatan rasionalitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perilaku pemilih dalam pilkades desa kemiri dibedakan menjadi dua yaitu perilaku pemilih dengan pendekatan rasional dan perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis. Pada praktiknya demokrasi dalam pemilihan umum di lingkup kelurahan belum tertanam dalam kehidupan warga desa kemiri. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemui pemilih yang menerima uang dari salah satu kandidat.

Kata kunci: perilaku, pemilih, politik uang

ABSTRACT

This study aims to identify the behavior of choosing pawisman villages in the midst of the implementation of pilkades in kemiri villages. The study used qualitative methods with data collection techniques using interviews and relevant previous research literature studies. The author tries to describe the characteristics of the voters, identify the behavior of voting in the community, and identify the factors that are taken into consideration choosing based on sociological considerations and rationality. The results showed that the majority of pecan villagers used the rationality approach. Based on the research conducted, voter behavior in pilkades of pecan villages is divided into two, namely voter behavior with a rational approach and voter behavior with a sociological approach. In practice, democracy in general elections at the village level has not yet been embedded in the lives of pecan villagers. This is evidenced by the fact that there are still voters who receive money from one of the candidates.

Keywords: behavior, voters, money politic

Pendahuluan

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehingga pilihan kepala desa berlangsung secara

demokratis [1]. Partisipasi masyarakat dalam politik tercermin dalam wujud pemenuhan penggunaan hak politik. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul [2]. Partisipasi politik penting karena partisipasi politik merupakan hak istimewa rakyat. Pembangunan partisipasi sebagai syarat

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

mutlak bagi terpenuhinya hak-hak rakyat dalam bidang politik [3]. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu dengan kegiatan pemilihan yang mencakup suara, akan tetapi juga sumbang-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan [4]. Kegiatan pemilihan dapat di implementasikan dalam pemilihan kepala desa. Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa [5]. Menurut Sadu Wasistiono (2006) tentang pemilihan desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaaan dan prefensi lokal mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun[6]. Hal ini sesuai dengan pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi : masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dipilih kembali hanya (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa menjabat selaku pimpinan desa hanya 6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Namun, pada fakta dilapangan masih banyak ditemukan fenomena politik transaksional akibat dari kecenderungan perilaku pemilih. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2019, sebanyak 176 daerah kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang. Sementara sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan

sedang (Kompas)[7]. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu potensi adanya praktik politik uang dengan mendasarkan pada sub dimensi Kampanye, partisipasi memilih, relasi kuasa tingkat lokal , pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu dan partisipasi publik terdapat 176 (34,2 persen) kabupaten/ kota yang rawan tinggi dan 337 (65,8 persen) kabupaten/ ota rawan sedang (IKP 2019)[6]. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa. Di beberapa daerah fenomena politik uang masih kerap terjadi dalam proses pemilihan kepala desa. Salah satunya yaitu di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, nominal politik uang yang dibagikan oleh tim sukses sebesar 100.000 sampai 200. 000 rupiah [7]. Fenomena negatif terjadi pada masa transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002) [8] mengindikasikan adanya fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Terdapat percampuran unsur demokratis dan non demokratis dalam sistem politik. Lany Diamond (2003) [9] memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda, yaitu terdapat fenomena yang disebut sebagai demokrasi semu (pseudo democracy). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang menjadi salah satu fenomena negatif mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang seperti Indonesia, politik uang dijadikan suatu alat untuk membeli suara dan mobilisasi dukungan bagi calon. Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemilihan kepala daerah di Desa Kemiri yang diikuti oleh dua calon kandidat. Salah satu calon kandidat membagikan amplop kepada masyarakat. Dan kandidat lainnya tidak membagikan amplop tetapi hanya berupa kampanye keliling desa. Melihat fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai kecenderungan perilaku pemilih ketika pelaksanaan pilkades Desa Kemiri. Penulis

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

ingin menggambarkan apakah politik uang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pilkades di Desa Kemiri.

Penelitian ini di gunakan untuk mengetahui mengetahui kecenderungan perilaku memilih warga desa kemiri di kabupaten Karanganyar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa kemiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Subjek dari penelitian ini adalah warga dusun gedangan, dawung, dan kemiri. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala desa Kemiri dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018. Pilkades diikuti oleh dua calon kandidat yaitu dengan inisial AS dan SP. Berdasarkan hasil pemungutan suara kepala desa terpilih yaitu Bapak AS dengan perolehan 3372 suara. Perlu diketahui bahwa kandidat terpilih sudah pernah menjabat sebelumnya sebagai kepala desa. Jadi, kemenangan saat ini termasuk masa jabatan yang kedua kalinya. Selain itu, salah satu tim sukses menuturkan bahwa calon terpilih turut membagi-bagikan amplop sebagai mobilisasi agar mendapat dukungan dari masyarakat "kedua calon memiliki perbedaan dalam hal kampanye, calon berinisial AS membagikan amplop kepada warga dan calon berinisial SP hanya melakukan kampanye dengan keliling dusun

menggunakan mobil dan speaker" (Wawancara, 13 April 2019). Hasil wawancara sejalan dengan penelitian di Ghana yang dilakukan oleh Lindberg (2012) [10] dimana dalam melakukan pemilihan umum, masih ditemui politik uang yang dimaksudkan untuk membeli suara. Politik uang yang dilakukan tidak berupa uang saja, akan tetapi sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Integritas dalam pemilihan kepala desa sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Norris (2014) [11] dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik. Pendapat terakhir yang berkaitan dengan integritas pemilihan umum pendapat dari Lehoucq (2003)[12] yang mengemukakan beberapa penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi; tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya *civil society organizations (social differentiation)*; angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya *literacy* warga. Jurnal bu rus

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa cara kampanye calon kandidat dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Kecenderungan perilaku dalam memilih calon kandidat berbeda-beda. Untuk mengetahui kecenderungan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perilaku memilih. Perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya dalam setiap perhelatan pemilihan umum (Nasrudin, 2010)[13]. Samuel P. Huntington (1990) [14] berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangansumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan. Terdapat tiga jenis pemilih dalam politik indonesia yaitu pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih pemilih kritis dan pemilih skeptis.

Pemilih Rasional

Pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada ‘policy-problem-solving’ dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan calon kandidat dalam program kerjanya. Pemilih tidak hanya melihat program kerja atau ‘platform’ calon kandidat yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh calon kandidat tersebut di masa lampau (Firmanzah: 2012) [15]. Wawancara dengan masyarakat setempat menyebutkan bahwa dasar dalam memilih yaitu melihat bagaimana cara kerja kandidat di masyarakat. Masyarakat melihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh calon kandidat. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat “saya memilih melihat cara kerjanya, jika pemilih yang belum pernah menjabat saya melihat bagaimana program kerja untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat. Berbeda halnya dengan calon kandidat yang sudah pernah menjabat sebagai kades, saya melihat bagaimana cara kerjanya selama menjabat. Intinya saya memilih calon kandidat yang mampu mengimplementasikan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat” (Wawancara, 13 April 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Touliang oleh Ira Indra Gerungan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa alasan masyarakat memilih karena mereka memperhitungkan apa keuntungan bagi diri mereka jika memilih kandidat yang mereka sukai [16]. Berdasarkan

wawancara tersebut berarti tingkat pendidikan di masyarakat sudah cukup baik karena masyarakat memilih berdasarkan rasionalitas. Menurut teori yang dikemukakan Downs, manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harta benda mereka. Jika hal ini di terapkan dalam perilaku pemilu, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya Dieter Roth (2009) [17]. Dilihat dari teori tersebut, perilaku masyarakat dalam memilih melihat keuntungan yang didapatkan dari calon kandidat. Masyarakat berinisial NH menuturkan bahwa ia memilih sesuai dengan hati nuraninya. Menurut pendapatnya, saya memilih tidak melihat dari pemberian uang, sembako dan lain-lain, “saya memilih tidak melihat baik atau buruknya calon tersebut menurut diri saya. Saya tidak terpengaruh oleh faktor dan pihak manapun karena saya sejak awal telah memilih calon kandidat berinisial SP disebabkan sudah cocok sesuai dengan pilihan hati saya, walaupun kandidat berinisial SP kalah dalam periode ini. Saya lebih setuju dengan program kerja yang ditawarkan oleh calon kandidat SP” (Wawancara, 13 April 2019)

Pemilih Tradisional

Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya,nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau calon kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut (Firmanzah, 2012)[18]. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat ahli bahwa pemilih tradisional merupakan jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

(Rohrscheneider, 2012) [19]. Hal ini di benarkan dengan pernyataan masyarakat bahwa pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang memiliki agama yang baik. Masyarakat berinisial SK mengatakan “pilih kades yang agamanya baik, calon kandidat inisial AS jika dimintai tanda tangan dikelurahan juga pelayanannya baik...” (Wawancara, 14 April 2019). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada sistem kompetisi partai di Kanada pada tahun 2004 oleh Scotto dalam pemilihan nasional di tahun 1997 dan 2000 menyimpulkan bahwa peranan ideologi dalam mempengaruhi pemilih sangat penting. [20]. Kategori pemilih ini masih ditemui di Desa Gedangan. Seperti yang ditemui oleh penulis ketika wawancara, pemilih jenis ini mendasarkan pada hal kesamaan agama. Menurut *Dan Nemmo*, kepercayaan, nilai, dan harapan masing-masingnya sering juga disebut sebagai unsur kognitif, afektif dan konatif, akan menunjukkan arah perilaku seseorang. Penelitian didukung dengan teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg Simmel (1890) pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Seperti halnya yang terjadi didalam pilkades desa kemiri, pemilih melihat sosok calon kepala desa berdasarkan agama yang dianutnya. Salah satu calon kepala desa, merupakan sosok pemuka agama di desa. Jadi, dalam pemilihannya selain memperhatikan untung dan ruginya, pemilih memperhatikan asal usul hingga sampai agama yang dianutnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Mulyadi di Gunung Tuleh, Sumatra Barat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku pemilih dilihat

dari segi sosiologis(kedekatan sosial budaya, nilai, asal usul, paham dan agama) yaitu pendidikan, latar belakang keluarga, dan kelas sosial (Rahmad Mulyadi, 2018) [21].

Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih akan menganalisis kaitan antara sistem nilai partai/calon kandidat dengan kebijakan yang dibuat. Sesuai dengan pernyataan warga setempat bahwa memilih calon kades harus mempertimbangkan mengenai perilaku, sikap maupun dari agama yang dianut calon, “saya memilih itu di dasarkan atas penilaian calon kandidat tersebut dalam kehidupan masyarakat, baik atau tidak. Selain itu, saya juga mempertimbangkan program kerja untuk memecahkan permasalahan di masyarakat” (Wawancara, 14 April 2019)

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kemiri yang dikuti oleh kedua calon kandidat dengan model kampanye yang berbeda. Hal ini menimbulkan kecenderungan perilaku dalam memilih. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui masing-masing informan memiliki kecenderungan emilih yang berbeda-beda. Perilaku memilih tersebut di bedakan menjadi empat yaitu pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih kritis dan pemilih skeptis. Jadi, kecenderungan pemilih dalam pemilihan pilkades yaitu pemilih rasional.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lestari, Sri. "Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warganegara Didesa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kebupaten Tanggamus". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 1 (4), 2012, pp.
- [2] Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia
- [3] Yuliandari, Erna. "Pembangunan Partisipasi Politik dalam Pilkada: Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis". *Jurnal PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan* Nomor 3448/J27.1.2/PP/2006
- [4] Huntington & Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [5] Janwandri. "Proses Pemilihan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Nanga Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Malinau Malinau Malinau Malinau Selatan Selatan Selatan Selatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Malinau Malinau Malinau Malinau". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* . 1 (1): 235-247, 2013
- [6] Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 diambil dari banwaslu.go.id
- [7] Kompas. Politik Uang di Berbagai Daerah
- [8] Markoff, John. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik (terj). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- [9] Diamond, Larry. 2003. Developing Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press
- [10] Lindberg, Staffan "Have the cake and eat it: The rational voter in Africa". *Jurnal Internasional*. 2012
- [11] Norris, P., Frank, R. W., & Martínez, F. (2014, Oktober). Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset. *Political Science & Politics*, 47(4), 789-798.
- [12] Lehoucq, F. (2003). Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences. *Annual Review of Political Science*, 6, 233–256.
- [13]
- [14] Huntington & Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [15] Firmanzah. 2012. Marketing Politik. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta
- [16] Ira Indra Gerungun. 2016. Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015. *Jurnal diambil dari laman ejournal.unsrat.aca.id*
- [17] Roth, Dieter (1991): Ein Parteiensystem im Wandel, dalam: Die neue Gesellschaft 2, hal 140-147
- [18] Firmanzah. 2012. Marketing Politik. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta
- [19] Rohrschneider, R (2002). "Mobilizing versus chasing: how do parties target voters in election campaigns?" *Electoral Studies*, (21), 3, hal 367-382
- [20] Roth, Dieter. Studi Pemilu Empiris: Sumber, teori- teori, instrumen dan metode. Mitra Alembana Grafika: Jakarta
- [21] Mulyadi, Rachmat. "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2014". *Jurnal FISIP Vol 5 No 1 2018*